DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2026



https://www.instagram.com/DISPERINDAGNGANJUK

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PROFILE.PHP?

https://disperindag.nganjukkab.go.id/BERITA/SEMUA-BERITA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Kerja perubahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam waktu 1 (satu) tahun mendatang, dalam rangka kelanjutan pembangunan, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Nganjuk yang makmur melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, agar dapat digunakan dengan sebaik- baiknya dan disampaikan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya penyusunan Perubahan Rencana Kerja sektor industri dan perdagangan. Semoga dapat digunakan sebagai acuan dan perbaikan bagi kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Nganjuk, Maret 2026
KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK

Dra. SRI HANDARININGRUM,MM
Pembina Tk I
NIP. 19680110 199412 2 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 3

1.3. Maksud dan Tujuan..... 10

1.4. Sistematika Penulisan..... 11

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD..... 12

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD..... 29

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD..... 40

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 55

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD..... 55

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Prioritas Pembangunan Daerah..... 67

4.2. Sasaran Perangkat Daerah..... 67

4.3. Program/ Kegiatan./Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026..... 68

BAB V PENUTUP 78

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026
RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode

1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional serta Dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

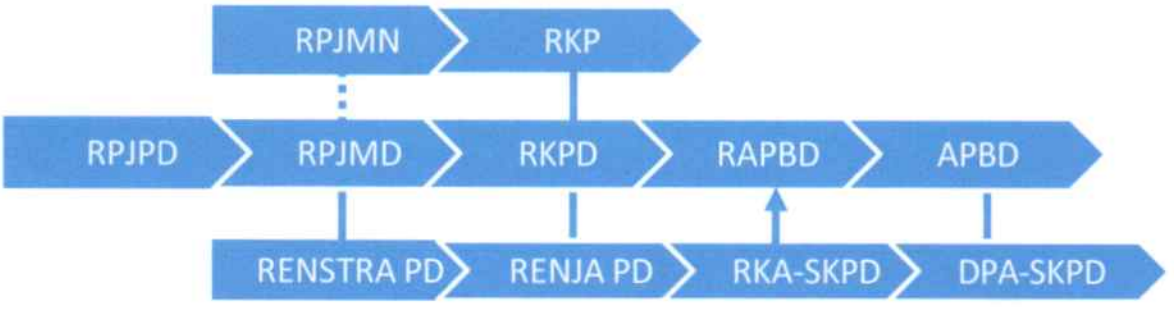
Tahapan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan , adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pada akhirnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
    Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi Geografis;
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran)

    Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko ;
32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan alayanan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha dan alayanan Daerah;

34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan tatacara Pengawasan dan Pengendalian Industri;
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
38. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
39. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
40. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
41. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan

    Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentangAlat_Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang;
45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan tera ulang UTTP;
46. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
53. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang standar Kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perindustrian;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
55. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran merk;
56. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang

Pendaftaran merk;

57. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
59. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
61. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:
62. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2027;
66. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 77 Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
67. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

68. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

69. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
70. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
71. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
72. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2027

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai penyesuaian rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah terhadap perkembangan keadaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan perubahan program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun 2026;
b. Mengakomodir Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah pergeseran APBD yang ditetapkan dalam Perubahan Penjabaran APBD;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2025, serta pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Laptri TW 1

TABEL 2. 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D 2025 KABUPATEN NGANJUK

tuan du	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri																															Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun	57	%	500.000.000	83,34	%	800.791.050	57	%	390.080.000	0	%	0	14,28	%	5.880.000	14,28	%	217.775.867	42,86	%	125.985.200	71,42	%	349.641.067	155	%	1.150.432.117	271,51	230,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas produk industri	Persentase produk IKM yang bersertifikasi (%)							3	%		0,77	%		0,83	%		0,45	%		1,15	%		3,20	%		3					
		Meningkatnya pertumbuhan usaha industri	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten (%)							2,2	%		0,51	%		0,58	%		0,58	%		0,58	%		2,25	%		2					
		Terbentuknya perwilayahan industri	Persentase perwilayahan industri yang terbentuk (%)							28	%											29,41	%		29,41	%		29					
		Meningkatnya produk IKM yang diajukan sertifikasi	Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi (%)							100	%											100	%		100,00	%		100					
		Meningkatnya penggunaan sarpras yang berkualitas	Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik (%)							59	%											59,45	%		59,45	%		59					
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	7	Dokumen	500.000.000	4	Dokumen	800.791.050	7	Dokumen	390.080.000	0	Dokumen	0	1	Dokumen	5.880.000	1	Dokumen	217.775.867	3	Dokumen	125.985.200	5	Dokumen	349.641.067	9	Dokumen	1.150.432.117	128,57	230,09	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	2	Dokumen	105.000.000	2	Dokumen	150.236.000	1	Dokumen	38.360.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	640.000	0 Dokumen	500.000	1 Dokumen	15.006.200		1	Dokumen	16.146.200	3	Dokumen	166.382.200	150,00	138,46	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	2	Dokumen	300.000.000	3	Dokumen	547.792.550	2	Dokumen	336.280.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	217.275.857	1 Dokumen	106.259.000	2	Dokumen	323.484.857	5	Dokumen	871.277.417	250,00	290,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	95.000.000				0	Dokumen	0	0 Dokumen	0		Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	-	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan			-				2	Dokumen	15.440.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.240.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	4.770.000	2	Dokumen	10.010.000	2	Dokumen	10.010.000	0,00	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri	79	%	130.000.000	77,6	%	30.778.720	79	%	33.358.000	17,95 %	6.632.607	20,51 %	7.730.580	20,51 %	7.387.596	20,51 %	11.312.595	79,48	%	33.063.378,16	157	%	63.842.098	198,84	49,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kemudahan perizinan IKM	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)							79	%								83,3 %		83,30									

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	33	Dokumen	130.000.000	6	Dokumen	30.778.720	33	Dokumen	33.358.000	3	Dokumen 6.632.607	2	Dokumen 7.730.580	3	Dokumen	7.387.596	1	Dokumen	11.312.595	9	Dokumen	33.063.378,16	15	Dokumen	63.842.098	45,45	49,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan / standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko	8	Dokumen	130.000.000	7	Dokumen	30.778.720	7	Dokumen	33.358.000	3	Dokumen 6.632.607	2	Dokumen 7.730.580	3	Dokumen	7.387.596	1	Dokumen	11.312.595	9	Dokumen	33.063.378,16	16	Dokumen	63.842.098	200,00	49,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan data dalam SIINas	25	%	100.000.000	25,12	%	51.920.420	25	%	98.468.000	6,24	% 5.664.607	6,30	% 9.715.583	6,30	%	7.752.595	6,24	%	60.542.596	25,08	%	83.675.380,56	50	%	135.595.801	200,80	135,60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kepatuhan pelaporan usaha industri	Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS (%)							25	%									25,17	%		25,17	%							
		Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	51.920.420	4	Dokumen	98.468.000	0	Dokumen 5.664.607	1	Dokumen 9.715.583	0	Dokumen	7.752.595	3	Dokumen	60.542.596	4	Dokumen	83.675.380,56	5	Dokumen	135.595.801	125,00	135,60	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	
		Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas	2	Dokumen	60.000.000	1	Dokumen	33.350.420	2	Dokumen	37.298.000	0	Dokumen	5.664.607	1	Dokumen	6.790.583	0	Dokumen	6.777.595	1	Dokumen	14.682.596	2	Dokumen	33.915.380,56	3	Dokumen	67.265.801	150,00	112,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas	2	Dokumen	40.000.000	1	Dokumen	18.570.000	2	Dokumen	61.170.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	2.925.000	0	Dokumen	975.000	2	Dokumen	45.860.000	2	Dokumen	49.760.000	3	Dokumen	68.330.000	150,00	170,83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP DISPERINDAG	85,3	Nilai	13.750.660.786	85,20	Nilai	10.319.458.262	85,30	Nilai	10.102.069.035	0	Nilai	1.097.790.588	82,30	Nilai	3.380.736.740	82,30	Nilai	2.233.820.554	82,30	Nilai	##########	82,30	Nilai	9.290.008.342,92	168	Nilai	19.609.466.605	196,37	142,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)							82,31	Nilai				82,30									82,30	Nilai							
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	Dokumen	105.000.000	13	Dokumen	113.260.640	17	Dokumen	30.896.000	15	Dokumen	4.900.000	3	Dokumen	12.331.000	6	Dokumen	7.312.000	4	Dokumen	6.289.000	28	Dokumen	30.832.000	41	Dokumen	144.092.640	241,18	137,23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	55.000.000	9	Dokumen	34.634.400	17	Dokumen	23.926.000	10	Dokumen	4.900.000	1	Dokumen	12.331.000	4	Dokumen	1.508.000	2	Dokumen	5.157.000	17	Dokumen	23.896.000	26	Dokumen	58.530.400	650,00	106,42	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6			7		8		9		10		11		12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	30.000.000	4	Laporan	27.700.820	4	Laporan	4.524.000	2	Laporan 0	2	Laporan 0	2	Laporan	3930000	2	Laporan	570000	8	Laporan	4.500.000	12	Laporan	32.200.820	300,00	107,34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	20.000.000	6	Laporan	50.925.420	3	Laporan	2.446.000	3	Laporan 0	0	Laporan 0	0	Laporan	1874000	0	Laporan	562000	3	Laporan	2.436.000	9	Laporan	53.361.420	180,00	266,81	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	104	Dokumen	9.712.660.786	93	Dokumen	7.767.241.749	104	Dokumen	8.212.023.000	30	Dokumen 976.066.442	30	Dokumen 2.682.941.277	34	Dokumen	1.814.273.752	41	Dokumen	2.043.466.883	135	Dokumen	7.516.748.354	228	Dokumen	15.283.990.103	219,23	157,36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75	orang/bulan	9.610.552.786	65	orang/bulan	7.662.602.709	70	Orang/bulan	8.158.140.000	62	orang/bulan 967.736.442	61	orang/bulan 2.670.446.277	64	orang/bulan	1.799.815.752	64	orang/bulan	2.025.289.883	64	orang/bulan	7.463.288.354	129	orang/bulan	15.125.891.063	172,00	157,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan pemantauahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen pemantauahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	60	Dokumen	51.000.000	110	Dokumen	49.199.750	60	Dokumen	49.980.000	23	Dokumen 8.330.000	23	Dokumen 12.495.000	28	Dokumen	12.495.000	35	Dokumen	16.660.000	109	Dokumen	49.980.000	219	Dokumen	99.179.750	365,00	194,47	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	6.108.000	1	Laporan	882.750	1	Laporan	1.316.000	1	Laporan 0	0	Laporan 0	0	Laporan	0	0	Laporan	1.308.000	1	Laporan	1.308.000	2	Laporan	2.190.750	200,00	35,87	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25	Laporan	45.000.000	36	Laporan	54.556.540	25	Laporan	2.587.000	6	Laporan 0	7	Laporan 0	6	Laporan	1963000	6	Laporan	209.000	25	Laporan	2.172.000	61	Laporan	56.728.540	244,00	126,06	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
													I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10			11			12			13=6+12			14=13:5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Dokumen	571.000.000	2	Dokumen	970.340.372	4	Dokumen	758.347.830	0 Dokumen	17.852.300	2 Dokumen	329.537.725	1 Dokumen	246.805.788	1 Dokumen	143.951.264	4 Dokumen	738.127.077	6 Dokumen	1.708.467.449	150,00	299,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	50	Paket	3.000.000	34	Paket	14.344.000	10	Paket	8.998.400	3 Paket	1.548.200	2 Paket	3.027.500	3 Paket	2.349.000	2 Paket	2.069.110	10 Paket	8.993.810	44 Paket	23.337.810	88,00	777,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Penalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penalatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	100.000.000	2	Paket	29.899.250	3	Paket	72.100.000	0 Paket	0	Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	70.642.385	3 Paket	70.642.385	5 Paket	100.541.635	250,00	100,54	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	200.000.000	12	Paket	90.471.740	8	Paket	60.496.430	2 Paket	1.550.600	4 Paket	32.856.075	0 Paket	10.045.400	2 Paket	13.858.919	8 Paket	58.310.994	20 Paket	148.782.734	166,67	74,39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket	8.000.000	7	Paket	628.972.600	12	Paket	481.155.000	2 Paket	2.250.000	5 Paket	279.398.000	0 Paket	181.037.880	5 Paket	18.395.500	12 Paket	481.081.380	19 Paket	1.110.053.980	158,33	### ###	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	10.000.000	11	Dokumen	5.550.000	12	Dokumen	6.000.000	3 Dokumen	1.110.000	3 Dokumen	1.665.000	3 Dokumen	1.665.000	3 Dokumen	1.560.000	12 Dokumen	6.000.000	23 Dokumen	11.550.000	191,67	115,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	12	Laporan	30.201.230	1	Laporan	23.250.000	0 Laporan	0	0 Laporan	4.428.150	0 Laporan	6.434.450	1 Laporan	6.344.100	1 Laporan	17.206.700	13 Laporan	47.407.930	108,33	94,82	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	200.000.000	12	Laporan	170.901.552	1	Laporan	106.348.000	0 Laporan	11.393.500	0 Laporan	8.163.000	- Laporan	45.274.058	1 Laporan	31.061.250	1 Laporan	95.891.808	13 Laporan	266.793.360	108,33	133,40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tun da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7	Unit	430.000.000	127	Unit	501.304.000	12	Unit	345.525.255	0	Unit 0	13	Unit 184.160.000	7	Unit 7.200.000	3	Unit 150.366.250	23	Unit	341.726.250	150	Unit	843.030.250	2142,86	196,05	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengadaan Mebel	jumlah paket mebel yang disediakan	66	Unit	150.000.000	101	Unit	34.700.000	2	Unit	7.200.000	0	Unit 0	0	Unit 0	7	Unit 7.200.000	0	Unit 0	7	Unit	7.200.000	108	Unit	41.900.000	163,64	27,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	29	Unit	280.000.000	49	Unit	395.310.000	13	Unit	338.325.255	0	Unit 0	13	Unit 184.160.000	0	Unit 0	3	Unit 150.366.250	16	Unit	334.526.250	65	Unit	729.836.250	224,14	260,66	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Laporan	298.000.000	1	Laporan	333.376.714	4	Laporan	566.265.000	0	Laporan 92.452.142	0	Laporan 233.184.202	0	Laporan 35.469.992	3	Laporan 152.007.439	3	Laporan	513.113.775	4	Laporan	846.490.489	100,00	284,06	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1	Laporan	3.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	5.000.000	0	Laporan 0	1	Laporan 5.000.000	0	Laporan 0	0	Laporan 0	1	Laporan	5.000.000	2	Laporan	9.000.000	200,00	300,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	Laporan	225.000.000	1	Laporan	236.246.294	1	Laporan	311.700.000	0	Laporan 60.149.895	0	Laporan 65.847.976	0	Laporan 67.728.968	1	Laporan 70.314.272	1	Laporan	264.041.111	2	Laporan	500.287.405	200,00	222,35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	Laporan	70.000.000	1	Laporan	93.130.420	1	Laporan	249.365.000	0	Laporan 32.302.247	0	Laporan 69.884.084	0	Laporan 60.193.166	1	Laporan 81.693.167	1	Laporan	244.072.663,92	2	Laporan	337.203.084	200,00	481,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah	7	Unit	210.000.000	40	Unit	378.350.637	7	unit	183.129.950	36	Unit 6.519.704	41	Unit 30.893.678	108	Unit 27.878.880	29	Unit 79.228.625	214	Unit	144.520.887	254	Unit	522.871.524	3628,57	248,99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	50.000.000	4	Unit	74.563.477	1	Unit	64.620.000	1 Unit	4.667.792	1 Unit	11.141.379	1 Unit	6.790.877	0 Unit	22.440.426	1	Unit	45.040.474	1	Unit	119.603.951	100,00	239,21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16	Unit	75.000.000	84	Unit	54.590.479	19	Unit	79.171.750	6 Unit	1.851.912	4 Unit	8.592.299	6 Unit	14.913.003	8 Unit	36.438.199	24	Unit	61.795.413	108	Unit	116.385.892	675,00	155,18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	50	Unit	10.000.000	2	Unit	9.999.000	15	Unit	4.995.000	0 Unit	0	27 Unit	4.960.000	84 Unit	0	0 Unit	0	111	Unit	4.960.000	113	Unit	14.959.000	226,00	149,59	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25	Unit	25.000.000	53	Unit	12.800.000	112	Unit	27.550.000	29 Unit	0	9 Unit	6.200.000	17 Unit	6.175.000	20 Unit	13.660.000	75	Unit	26.035.000	128	Unit	38.835.000	512,00	155,34	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	50.000.000	2	Unit	218.402.681	1	Unit	6.793.200	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	6.690.000	1	Unit	6.690.000	3	Unit	225.092.681	150,00	450,19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	1	Dokumen	15.000.000	0	Dokumen	5.651.000	1	Dokumen	5.882.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	141.000	0 Dokumen	2.428.000	1 Dokumen	2.371.000	1	Dokumen	4.940.000	1	Dokumen	10.591.000	100,00	70,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	15.000.000	1	Laporan	5.651.000	1	Laporan	5.882.000	1 Laporan	0	0 Laporan	141.000	0 Laporan	2.428.000	0 Laporan	2.371.000	1	Laporan	4.940.000	2	Laporan	10.591.000	200,00	70,61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan																													

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV											
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan	90	%	153.890.000	100	%	148.904.920	90	%	37.968.000	8 %	4.614.607	0 %	10.405.583	40	% 9.334.595	0	% 12.951.596	48	%	37.306.380,56	148	%	186.211.301	164,44	121,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kepatuhan perizinan pelaku usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang tuat perizinan (%)							19,67	%		7,41 %		0 %		37,04	%	11,11	%	56	%								
			Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)							24,86	%		0 %		0 %		0	%	0	%	-	%								
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase penerbitan TDG	90	%	98.890.000	19,23	%	135.514.920	90	%	31.718.000	8 %	4.614.607	0 %	9.715.583	40	% 7.842.595	0	% 8.927.595,56	48	%	31.100.380,56	67	%	166.615.301	74,70	168,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	27	Dokumen	98.890.000	5	Dokumen	135.514.920	25	Dokumen	31.718.000	2 Dokumen	4.614.607	0 Dokumen	9.715.583	10	Dokumen 7.842.595	3	Dokumen 8.927.595,56	15	Dokumen	31.100.380,56	20	Dokumen	166.615.301	74,07	168,49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses	2	Dokumen	55.000.000			13.390.000	2	Dokumen	6.250.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	690.000	0	Dokumen 1.492.000	0	Dokumen 4.024.000	0	Dokumen	6.206.000	0	Dokumen	19.596.000	0,00	35,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K	Rp		K		Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	Dokumen	55.000.000			13.390.000	2	Dokumen	6.250.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	690.000	0	Dokumen	1.492.000	0	Dokumen	4.024.000	0	Dokumen	6.206.000	0	Dokumen	19.596.000	0,00	35,63	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik luar negeri							2	Dokumen																				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Omset Perdagangan	1089	Milyar	6.450.000.000	1439	Milyar	6.590.431.879	1089	Milyar	4.498.363.900	183,99	Milyar	721.045.846	296,42	Milyar	1.115.234.707	256,91	Milyar	971.460.263	260	Milyar	1.594.784.114	997,11	Milyar	4.402.524.929,58	2436,11	Milyar	10.992.956.809	223,70	170,43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Layak (%)							54	%																				
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	Unit	6.000.000.000	0	Unit	6.326.099.624	3	unit	4.323.634.900	0	Unit	698.453.862	0	Unit	1.071.415.740	0	Unit	938.265.684	3	Unit	1.521.925.275	3	Unit	4.230.060.560,68	3	Unit	10.556.160.185	30,00	175,94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8	Unit	6.000.000.000	7	Unit	6.326.099.624	3	Unit	4.323.634.900	0	Unit	698.453.862	0	Unit	1.071.415.740	0	Unit	938.265.684	3	Unit	1.521.925.275	3	Unit	4.230.060.560,68	10	Unit	10.556.160.185	125,00	175,94	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11				12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35	Pasar	450.000.000	35	Pasar	264.332.255	35	Pasar	174.729.000	35	Pasar 22.591.984	35	Pasar 43.818.967	35	Pasar 33.194.579	35	Pasar 72.858.839			35	Pasar	172.464.368,90	70	Pasar	436.796.624	200,00	97,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	450.000.000	1	Dokumen	264.332.255	1	Dokumen	174.729.000	0	Dokumen 22.591.984	0	Dokumen 43.818.967	0	Dokumen 33.194.579	1	Dokumen 72.858.839			1	Dokumen	172.464.368,90	2	Dokumen	436.796.624	200,00	97,07	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Presentase Kinerja Realisasi Pupuk	96	%	863.846.600	100	%	100.839.165	96	%	81.450.000	33,21	% 4.614.607	27,43	% 16.326.583	16,82	% 4.229.810	18,51	% 37.497.000			95,97	%	62.668.000	196	%	163.507.165	204,14	18,93	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terkendalinya harga bahan pokok	Koefisien laju harga bapokting (Angka)							12,2	Angka		3,32	%	-7,15	%	-3,28	%	-7,78	%		-14,89									
			Persentase kinerja realisasi pupuk (%)							90	%		22,63	%	18,69	%	23,06	%	20,80	%		85,18	%								
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota	4	Laporan	177.635.000	3	Laporan	41.570.165	4	Laporan	43.800.000	1	Laporan 4.614.607	1	Laporan 14.026.583	1	Laporan 3.179.810	1	Laporan 21.866.000			4	Laporan	43.687.000	7	Laporan	85.257.165	175,00	48,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	4	Laporan	67.635.000	4	Laporan	36.551.165	4	Laporan	16.495.000	1	Laporan 4.614.607	1	Laporan 6.790.583	1	Laporan 3.179.810	1	Laporan 1.866.000			4	Laporan	16.451.000	8	Laporan	53.002.165	200,00	78,36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2	Laporan	110.000.000	2	Laporan	5.019.000	2	Laporan	27.305.000	1	Laporan 0	1	Laporan 7.236.000	0	Laporan 0	2	Laporan 20.000.000			4	Laporan	27.236.000	6	Laporan	32.255.000	300,00	29,32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10			11		12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan	100.000.000	3	Laporan	59.269.000	4	Laporan	37.650.000	1	Laporan 0	1	Laporan 2.300.000	1	Laporan	1.050.000	1	Laporan	15.631.000	4	Laporan	18.981.000	7	Laporan	78.250.000	175,00	78,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	4	Laporan	100.000.000	4	Laporan	59.269.000	4	Laporan	37.650.000	1	Laporan 0	1	Laporan 2.300.000	1	Laporan	1.050.000	1	Laporan	15.631.000	4	Laporan	18.981.000	8	Laporan	78.250.000	200,00	78,25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor	60	%	200.000.000	50	%	88.882.600	60	%	32.275.000	0	% 0	0	% 0	0	%	5.099.000	45	%	22.683.440	45	%	27.782.440	95	%	116.665.040	158,33	58,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya nilai ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor (%)							1	%		0	%	0	%	0	%		1,50	%		2	%							
		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi	12	Pelaku usaha	200.000.000	25	Pelaku usaha	88.882.600	12	Pelaku Usaha	32.275.000	0	Pelaku usaha 0	0	Pelaku usaha 0	0	Pelaku usaha	5.099.000	9	Pelaku usaha	22.683.440	9	Pelaku usaha	27.782.440	34	Pelaku usaha	116.665.040	283,33	58,33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan	2	Pelaku usaha	100.000.000	1	Pelaku usaha	73.284.225	10	Pelaku Usaha	25.779.000	0	Pelaku usaha 0	0	Pelaku usaha 0	0	Pelaku usaha	0	7	Pelaku usaha	21708440	7	Pelaku usaha	21.708.440	8	Pelaku usaha	94.992.665	400,00	94,99	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi	2	Produk	100.000.000	30	Produk	15.598.375	5	Produk	6.496.000	0	Produk 0	0	Produk 0	0	Produk	5.099.000	2	Produk	975.000	2	Produk	6.074.000	32	Produk	21.672.375	1600,00	21,67	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku	85,6	%	190.000.000	103,07	%	151.877.020	85,55	%	97.410.800	4,09	% 14.304.014	4,36	% 36.154.196	45,19	%	12.002.160	54,27	%	33.968.691	107,91	%	96.429.061,12	211	%	248.306.081	246,62	130,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

tan da	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 %		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II		III		IV												
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11			12			13=6+12			14=13/5*100%		15
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K		Rp	K	Rp	
		pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	8555	UTTP	190.000.000	8761	UTTP	151.877.020	8555	UTTP	97.410.800	350	UTTP	14.304.014	373	UTTP	36.154.196	3866	UTTP	12.002.160	4643	UTTP	33.968.691	9.232	UTTP	96.429.061,12	17993	UTTP	248.306.081	210,32	130,69	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang	Jumlah alat sikur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	8555	Unit	125.000.000	8761	UTTP	111.922.000	8555	Unit	53.007.800	350	Unit	9.689.407	373	Unit	22.993.803	3866	Unit	1.749.375	4643	Unit	17.840.596	9.232	Unit	52.273.180,56	17993	Unit	164.195.181	210,32	131,36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina	150	orang	65.000.000	659	orang	41.063.600	750	orang	44.403.000	56	orang	4.614.607	52	orang	13.160.393	363	orang	10.252.785	474	orang	16.128.096	945	orang	44.155.880,56	1604	orang	85.219.481	1069,33	131,11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk	58,4	%	800.000.000	77,5	%	586.883.120	58,44	%	348.252.950	0	%	9.229.214	14,61	%	35.632.967	17,53	%	83.781.990	23,38	%	198.568.751	55,32	%	327.212.921,60	133	%	914.096.042	227,62	114,26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya perluasan pemasaran perdagangan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar (%)							12,34	%		0	%		3,09	%		3,70	%		5,55	%		12,34	%		12	%		#DIV/0!		
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	47	UMKM	800.000.000	85	UMKM	586.883.120	45	UMKM	348.252.950	0	UMKM	9.229.214	25	UMKM	35.632.967	30	UMKM	83.781.990	45	UMKM	198.568.751	100	UMKM	327.212.921,60	185	UMKM	914.096.042	393,62	114,26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	47	UMKM	800.000.000	101	UMKM	586.883.120	100	UMKM	348.252.950	0	UMKM	9.229.214	25	UMKM	35.632.967	30	UMKM	83.781.990	45	UMKM	198.568.751	100	UMKM	327.212.921,60	201	UMKM	914.096.042	427,66	114,26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
≥ 80%	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
≤ 59%	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	53,33%	

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Faktor Penyebab Hal ini disebabkan karena Pelaksanaan Kegiatan diukur dari pengajuan dokumen permohonan ijin dari pelaku usaha	Implikasi terhadap Target Renstra PD	
Target Tidak Tercapai	Tidak Tercapai	
Program Pengembangan Ekspor	75%	
Faktor Penyebab karena Pelaksanaan Kegiatan mengikuti jadwal dari provinsi dan mengikuti kegiatan di Kabupaten sehingga Kegiatan Pengembangan ekspor terlaksana di tribulan 4	Implikasi terhadap Target Renstra PD	
Target Kurang Tercapai	Kurang Tercapai	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,99%	
Faktor Penyebab Konsistensi dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran, mulai dari Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja hingga LKjIP, sehingga keterkaitan antara perencanaan dan pelaporan kinerja terjaga dengan baik dan Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran perangkat daerah dalam mendorong budaya kinerja dan akuntabilitas.	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Program Perencanaan danpembangunan industri	125,30%.	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	100,61%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
ProgramPengelolaan Sistem Industri Nasional	100,32%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	125,05%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	tercapainya target renstra	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagagan	91,56%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	95%	

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	99,97%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Kunci Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2025

No.	Indikator IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
	Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan												
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten	0,49%	1,87%	1,97%	2,01%	1.15%	2,2%	0,49%	1,97%	0,95%	0,62%	2,2%	2,2%
2	Persentase Terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,0%	90%	90%	90%	93,97%	90%	82,01%	95,83%	96.35%	96,44%	81,96%	95,97%
5.	Persentase alat-alat ukur, takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	88,30%	85,00	85,55	86,11	85,00	90%	63,52%	47,39%	53,31%	99,50%	89,12%	107,8
6.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah Kerjanya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%

TABEL 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
1	Persentase IKM yang terstandarisasi			15,97	18,50	18,90	19,60	20,30	21,06	15,97	18,13	19,14	19,67	
2	Persentase Pertumbuhan usaha Industri			1,57	1,67	1,77	1,87	1,97	2,00	1,57	1,62	1,70	1,97	
3	Persentase Pertumbuhan IKM berbasis Produk Lokal			6,16	6,28	6,38	6,48	6,58	6,68	6,16	6,20	5,51	6,55	
4	Volume Usaha Perdagangan dalam Negeri			1,24	5,76	5,78	5,80	5,82	5,84	1,20	5,70	5,69	5,82	
5	Nilai Ekspor			43	45	47	49	51	53	45	48	38	50,1	

TABEL 2.5

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	1,97%	2,00	101,52	2.01	2,05	101,99
		Persentase Hasil Pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah	73,68%	75,00	101,79	75,00	76,47	101,96
2.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Fasilitasi izin usaha perdagangan	90,00%	91,30	101,44	90,00	100	111,11
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90,00%	98,38	109,31	90,00	96,44	107,16
		Presentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,98%	6,57	109,87	6,00	6,03	100,5
		Presentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85,55%	53,32	62,33	86,11	55,28	64,20

Tabel 2.6

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Tahun 2024			Tahun 2025		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas sektor Industri dan Perdagangan	1	Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor industri (*)	11,80	6,67	56,53	6,32	6,71	106,17
		2	Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor perdagangan (*)	5,4	4,90	90,74	6,77	6,10	90,10
1.	Meningkatkan Pertumbuhan sektor industri	1	Persentase Pertumbuhan industri Kecil dan Menengah	2,1	2,15	102,38	2,2	2,46	111,82
2	Meningkatnya Pertumbuhan sektor Perdagangan	1	Persentase Peningkatan omzet sektor Perdagangan	6,1	6,03	98,85	2,18	1,84	84,40

Tabel 2.7

REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	Meningkatnya Nilai Tambah sector Perindustrian dan Perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (*)	16,27	16,05	98,65
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran , Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) (*)	20,54	20,69	100,73
2	Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Nilai Produksi industri	2,2	2,21	100,45
3	Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Perdagangan	Persentase Peningkatan Nilai sektor Perdagangan	6,78	6,79	100,15

Tabel 2.8

INDIKATOR KINERJA KUNCI PADA RPJMD KAB NGANJUK TAHUN 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	81,96	90	95,97	106,63
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	22,86	24,86	25,14	101,13
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	89,12	90	107,91	119,90
4	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	2,15	2,2	2,2	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	77	79	83,30	105,44
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	0	100
7	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	100	100	84,85	84,85
8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100

2.2.1 Tingkat Kinerja Pelayanan

1. Bidang Perindustrian

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian pula dengan industri kecil semakin

2.2.1 Jumlah Industri Formal dan Non Formal Tahun 2020-2024

a. Industri Non Formal								
No	**Uraian**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**	**Tahun 2025**	**Satuan**
1.	Unit Usaha	15 428	15 451	15 493	16 268	16 280	16.443	Unit
2.	Tenaga Kerja	44 236	44 280	44 374	44 424	44 486	44.931	Orang
3.	Nilai Produksi	1 887 993 501	1 888 393 501	1 889 343 501	1 889 893 501	1 892 539 352	1.934.175.218	Rp
4	Nilai Investasi	21 480 279	22 280 279	24 080 279	25 080 279	25 115 391	580.252.656	Rp
b. Industri Formal								
1	Unit Usaha	1331	1327	1369	1530	1563	1.598	Unit
2	Tenaga Kerja	17 702	17 724	17 812	18 520	18 890	19.306	Orang
3	Nilai Produksi	3 799 539	3 974 539	4 324 539	52 474 539	53 524 030	4.952.673.982	Rp
4	Nilai Investasi	73 657 966	74 357 966	75 757 966	401 157 966	409 181 125	1.485.802.195	Rp

2. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2017-2020 seperti pada table 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Nilai Ekspor

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Ekspor	38.640.852.988	50.100.000.000	16,651.815.394,76	9.450.480.000.000	1.963.624.424.587	1.993.121.586.153

1. Bidang Metrologi

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Anak Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP meliputi :

Tabel 2.8
RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDRAT YANG DIMILIKI

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
1	Meter Kayu	Komparator sidang 1m / 1m
2	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (Termasuk Timbangan Jembatan Maksimum Kapasitas 5 Ton)	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Anak Timbangan Kelas M2 (2 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (5 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (10 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (20 Kg) - Anak Timbangan Lemping sampai dengan 110 kg - Anak Timbangan Bidur M2 20kg (25 buah)
3	Timbangan Pegas	
4	Timbangan Cepat	
5	Timbangan Cepat Meja	
6	Neraca	
7	Dacin	
8	Timbangan Milisimal	
9	Timbangan Sentisimal	
10	Timbangan Desimal	
11	Timbangan Bobot Ingsut	
12	Timbangan Meja Beranger	

NO	RINCIAN UTTP	PERALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
13	Anak Timbangan sebagai Perlengkapan Timbangan Neraca, dan Meja	- Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g)
		- Timbangan Elektronika 2000 g/0.01 g - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.001g
14	Pompa Ukur BBM	- Bejana ukur 5L, 10L, 20L - Gelas ukur 1000ml/10ml - penyipat datar - Landasan bejana ukur - Stopwatch - Thermometer

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2020-2024 adalah seperti pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Jumlah UTTP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah UTTP	15.245	11.373	9.597	9.653	8.761	9232

2. Bidang Pasar

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/luar,bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2017-2022 adalah seperti pada tabel 2.10 berikut terlampir ;

REALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN KEBERSIHAN TAHUN 2020 – 2025
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	URAIAN	SATUAN	REALISASI					
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Bedag tepi /luar	Rp	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80	1.583.084.763,46	1.670.786.062,65	2.371.835.545,50	2.506.520.371,00
2	Bedag dalam	Rp	538.914.661,00	736.691.800,00	1.094.309.400,00	1.235.094.000,00	1.795.194.600,00	1.886.982.138,00
3	Bedag dalam los	Rp	491.850.900,00	615.613.400,00	726.525.000,00	817.149.500,00	1.168.829.000,00	1.261.703.900,00
4	Di bawah Los	Rp	495.770.220,00	689.486.000,00	971.666.900,00	1.118.463.400,00	1.591.462.850,00	1.648.003.550,00
5	Pelataran	Rp	127.723.150,00	178.237.200,00	191.854.100,00	201.250.400,00	330.201.200,00	415.019.900,00
6	Ijin tempat	Rp	245.169.334,48	256.731.475,76	250.701.439,33	248.750.166,18	-	-
7	Penitipan kendaraan	Rp	116.375.000,00	172.444.000,00	164.032.500,00	199.653.000,00	318.184.800,00	368.808.900,00
8	Ternak	Rp	47.832.500,00	64.899.000,00	151.842.500,00	199.479.000,00	275.322.500,00	229.497.000,00
9	BBN (Bea Balik Nama)	Rp	16.739.306,00	46.376.060,00	27.773.421,00	34.611.237,00	1.906.030,00	833.579.500,00
10	Kebersihan	Rp	185.508.000,00	252.608.000,00	258.528.600,00	291.490.100,00	719.045.600,00	833.579.500,00
JUMLAH		**Rp**	**3.431.114.547,15**	**4.611.429.089,56**	**5.420.318.623,79**	**6.016.726.865,83**	**8.571.982.125,50**	**9.150.115.259,00**

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Peningkatan Daya Saing Industri melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Penguasaan Teknologi dan Standarisasi Produk
2. Pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industry daerah dan klister industry serta produk unggulan
3. Peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi atas produk yang di hasilkan
4. peningkatan kualitas kondisi fisik pasar rakyat

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
1.	Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri	
		2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	

2	Belum terbentunya sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan	
		Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	
3	Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri	Program Pengendalian izin usaha industry Kegiatan Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri ((IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI< IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
		yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	

		Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
4.	Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri	Program Pengembangan Ekspor Kegiatan Penyelenggaran Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota Sub	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
5.	Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
6.	Belum OptimalnyaSarana dan Prasarana Pasar	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

	rakyat		
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub KegiatanPenyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
7.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdaganan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

Tabel 2.11

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD PERUBAHAN TAHUN 2026 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Perindustrian dan Perdagnagan	82,32	82,32	**14.214.094.563**	**14.304.149.473**	90.054.910	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	25 Dokumen		**14.856.000**	**20.356.000**	**5.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	7.128.000	9.128.000	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisaasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 laporan	1.840.000	3.340.000	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.888.000	7.888.000	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**8.340.644.173**	**8.319.944.173**	**- 20.700.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	8.266.679.173	8.266.679.173	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	70.680.000	49.980.000	- 20.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.460.000	1.460.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	1.825.000	1.825.000	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**11.660.000**	**10.400.000**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.660.000	10.400.000	- 1.260.000	Merubah Rincian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**675.721.650**	**759.221.650**	**83.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	8 Paket	9.996.900	11.996.900	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	35.944.750	40.944.750	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 paket	8 paket	500.615.200	575.615.200	75.000.000	Pengadaan Karcis Pelyanan Pasar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	3.500.000	500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.136.800	10.136.800	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	117.028.000	117.028.000	-	
							-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**20.990.090**	**198.035.000**	177.044.910	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit	20.990.090	198.035.000	177.044.910	2 unit Timbangan Ternak
							-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**5.068.276.000**	**4.708.246.000**	**- 360.030.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	282.000.000	282.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	4.785.276.000	4.425.246.000	- 360.030.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**81.946.650**	**287.946.650**	**206.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	I unit	I unit	24.500.000	26.500.000	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	43.626.650	45.626.650	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 unit	60 Unit	13.820.000	15.820.000	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	2 Unit	-	200.000.000	200.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				440.094.000	642.194.000	202.100.000	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Persentase produk IKM yang bersertifikasi**	**7,51%**	**7,51%**	**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	-
		Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	**2,3%**	**2,3%**				
		Persentase perwilayahan industri yang terbentuk	**35%**	**35%**				
		Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi	**100%**	**100%**				
		Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik	**60%**	**60%**				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri**			**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2 Dokumen	3 dokumen	51.000.000	101.000.000	50.000.000	Pelatihan untuk sentra IKM Tahu Desa Sekarputih Kec Bagor
	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.235.000	30.235.000	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	204.609.000	356.709.000	152.100.000	Pelatihan Batik Lanjutan bagi IKM Batik
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	121.000.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.340.000	9.340.000	-	
							-	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	80%	80%	5.925.000	5.925.000	-	
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS**	**25%**	**25%**	**17.985.000**	**17.985.000**	**0**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)						
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	91%		**101.965.350**	**180.965.350**	**79.000.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	101.965.350	180.965.350	79.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	24.540.500	103.540.500	79.000.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi yang dibina	770 Orang		77.424.850	77.424.850		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**743.148.000**	**978.148.000**	**235.000.000**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**jumlah sarana distribusi perdagangan**			615.160.000	850.160.000		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	2 unit	3 unit	615.160.000	850.160.000	235.000.000	DED Pasar Tawang
							0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				127.988.000	127.988.000	0	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	127.988.000	127.988.000	0	
	PERDAGANGAN				**244.004.500**	**525.863.500**	**281.859.000**	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan**	**21,33%**	**21,33%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
		Persentase pelaku usaha yang memperolehizin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	**26,86%**	**26,86%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	**25 Dokumen**	**10 Dokumen**	**3.450.000**	**3.450.000**	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25 Dokumen	10 Dokumen	3.450.000	3.450.000	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	**10.315.000**	**27.495.000**	**17.180.000**	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	10.315.000	27.495.000	17.180.000	Pembahasan Perbup Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Koefisien laju harga bapokting**	**11,95**	**11,95**	**37.788.500**	**79.823.500**	**42.035.000**	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	**90%**	**90%**				
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**16.988.500**	**59.023.500**	**42.035.000**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	2.175.000	13.410.000	11.235.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	14.813.500	45.613.500	30.800.000	- Pasar Murah Menjelang Natal dan Tahun Baru - Sidak Operasi Pasar
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**20.800.000**	**20.800.000**	-	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	20.800.000	20.800.000	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar**	**13,61%**	**13,61%**	**192.451.000**	**415.095.000**	**222.644.000**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	- Batik Fashion - Pameran Dekranasda
		TOTAL			**15.743.306.413**	**16.631.320.323**	**888.013.910**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor,antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Tabel 2.12

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2027

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2027

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 mengangkat tema " Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"

dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut :

1. Kedaulatan Pangan dan Energi:
2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif:
3. Pendidikan dan Kesehatan:

   Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan pengembangan Sekolah Rakyat.
4. Deregulasi dan Kepastian Hukum:

   Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.
5. Pertahanan Semesta:
6. Peningkatan kesiapan pertahanan negara.
7. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi:
8. Hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pengembangan infrastruktur pendukung.
9. Adopsi Teknologi dan Inovasi:

   Mendorong inovasi dan adopsi teknologi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.
10. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
11. Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi:

    Menjaga stabilitas ekonomi makro dan memastikan pengelolaan fiskal yang adaptif terhadap perubahan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah" Meningkatnya produksi sektor Industri dan Perdagangan "

adapun sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri
2. Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Perdagangan

dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	TARGET 2026
1	2	3	4	5
Meningkatnya produksi sektor industri dan Perdagangan		Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	16,61
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	%	20,55
	Meningkatnya Nilai Produktivitas industri	Persentase peningkatan Nilai Produksi industri	%	2,3
	Meningkatnya pertumbuhan nilai perdagangan	Persentase peningkatan Nilai sektor perdagangan	%	6,96

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

Pencapaian Tujuan dan Sasaaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026, yaitu "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi, dengan Program prioritas pembangunan tahun 2026 sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan
7. Menjadikan Nganjuk Sebagai destinasi wisata
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader)

Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 3.2 REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NGANJUK TAHUN 2027

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Perindustrian dan Perdagnagan	82,32	82,32	**14.214.094.563**	**14.304.149.473**	90.054.910	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	25 Dokumen		**14.856.000**	**20.356.000**	**5.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	7.128.000	9.128.000	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisaasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 laporan	1.840.000	3.340.000	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.888.000	7.888.000	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**8.340.644.173**	**8.319.944.173**	**- 20.700.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	8.266.679.173	8.266.679.173	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	70.680.000	49.980.000	- 20.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.460.000	1.460.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	1.825.000	1.825.000	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**11.660.000**	**10.400.000**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.660.000	10.400.000	- 1.260.000	Merubah Rincian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**675.721.650**	**759.221.650**	**83.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	8 Paket	9.996.900	11.996.900	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	35.944.750	40.944.750	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 paket	8 paket	500.615.200	575.615.200	75.000.000	Pengadaan Karcis Pelyanan Pasar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	3.500.000	500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.136.800	10.136.800	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	117.028.000	117.028.000	-	
							-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**20.990.090**	**198.035.000**	177.044.910	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit	20.990.090	198.035.000	177.044.910	2 unit Timbangan Ternak

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**5.068.276.000**	**4.708.246.000**	**- 360.030.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	282.000.000	282.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	4.785.276.000	4.425.246.000	- 360.030.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**81.946.650**	**287.946.650**	**206.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	I unit	I unit	24.500.000	26.500.000	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	43.626.650	45.626.650	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 unit	60 Unit	13.820.000	15.820.000	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	2 Unit	-	200.000.000	200.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**440.094.000**	**642.194.000**	**202.100.000**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Persentase produk IKM yang bersertifikasi**	**7,51%**	**7,51%**	**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	-

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	**2,3%**	**2,3%**				
		Persentase perwilayahan industri yang terbentuk	**35%**	**35%**				
		Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi	**100%**	**100%**				
		Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik	**60%**	**60%**				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri**			**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2 Dokumen	3 dokumen	51.000.000	101.000.000	50.000.000	Pelatihan untuk sentra IKM Tahu Desa Sekarputih Kec Bagor
	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.235.000	30.235.000	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	204.609.000	356.709.000	152.100.000	Pelatihan Batik Lanjutan bagi IKM Batik
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	121.000.000	-	
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.340.000	9.340.000	-	
							-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	80%	80%	5.925.000	5.925.000	-	
	Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS**	**25%**	**25%**	**17.985.000**	**17.985.000**	**0**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	91%		**101.965.350**	**180.965.350**	**79.000.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	101.965.350	180.965.350	79.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	24.540.500	103.540.500	79.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi yang dibina	770 Orang		77.424.850	77.424.850		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**743.148.000**	**978.148.000**	**235.000.000**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**jumlah sarana distribusi perdagangan**			615.160.000	850.160.000		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	2 unit	3 unit	615.160.000	850.160.000	235.000.000	DED Pasar Tawang
							0	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				127.988.000	127.988.000	0	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	127.988.000	127.988.000	0	
	PERDAGANGAN				**244.004.500**	**525.863.500**	**281.859.000**	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan**	**21,33%**	**21,33%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
		Persentase pelaku usaha yang memperolehizin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	**26,86%**	**26,86%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	**25 Dokumen**	**10 Dokumen**	**3.450.000**	**3.450.000**	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25 Dokumen	10 Dokumen	3.450.000	3.450.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	**10.315.000**	**27.495.000**	**17.180.000**	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	10.315.000	27.495.000	17.180.000	Pembahasan Perbup Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Koefisien laju harga bapokting**	**11,95**	**11,95**	**37.788.500**	**79.823.500**	**42.035.000**	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	**90%**	**90%**				
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**16.988.500**	**59.023.500**	**42.035.000**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	2.175.000	13.410.000	11.235.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	14.813.500	45.613.500	30.800.000	- Pasar Murah Menjelang Natal dan Tahun Baru - Sidak Operasi Pasar
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**20.800.000**	**20.800.000**	-	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	20.800.000	20.800.000	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang teraksos pasar**	**13,61%**	**13,61%**	**192.451.000**	**415.095.000**	**222.644.000**	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	- Batik Fashion - Pameran Dekranasda
		TOTAL			**15.743.306.413**	**16.631.320.323**	**888.013.910**	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2027. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2027)
1	Optimalisasi dan Revitalisasi Pasar Tradisional	Rp. 1.035.402.500

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran	**Indikator Kinerja**	**TargetTahun 2027**	Alokasi (2027)
1. Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri(%)	2,4	Rp. 970.980.000
2. Meningkatnya Pertumbuhan nilai Perdagangan	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan(%)	7,14	Rp. 2.066.592.350

Tabel 4.3

USULAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Perindustrian dan Perdagnagan	82,32	82,32	**14.214.094.563**	**14.304.149.473**	90.054.910	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan data kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan substansi	25 Dokumen		**14.856.000**	**20.356.000**	**5.500.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen	7.128.000	9.128.000	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisaasi kinerja SKPD	8 Laporan	8 laporan	1.840.000	3.340.000	1.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.888.000	7.888.000	2.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				**8.340.644.173**	**8.319.944.173**	**- 20.700.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang	64 Orang	8.266.679.173	8.266.679.173	-	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	70.680.000	49.980.000	- 20.700.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.460.000	1.460.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	25 Laporan	1.825.000	1.825.000	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				**11.660.000**	**10.400.000**		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.660.000	10.400.000	- 1.260.000	Merubah Rincian
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				**675.721.650**	**759.221.650**	**83.500.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 Paket	8 Paket	9.996.900	11.996.900	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	35.944.750	40.944.750	5.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8 paket	8 paket	500.615.200	575.615.200	75.000.000	Pengadaan Karcis Pelyanan Pasar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000	3.500.000	500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	9.136.800	10.136.800	1.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	117.028.000	117.028.000	-	
							-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				**20.990.090**	**198.035.000**	177.044.910	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 unit	20.990.090	198.035.000	177.044.910	2 unit Timbangan Ternak
							-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**5.068.276.000**	**4.708.246.000**	**- 360.030.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	1.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	282.000.000	282.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 laporan	1 laporan	4.785.276.000	4.425.246.000	- 360.030.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**81.946.650**	**287.946.650**	**206.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	I unit	I unit	24.500.000	26.500.000	2.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yangDipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 unit	19 unit	43.626.650	45.626.650	2.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60 unit	60 Unit	13.820.000	15.820.000	2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1 unit	2 Unit	-	200.000.000	200.000.000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				**440.094.000**	**642.194.000**	**202.100.000**	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	**Persentase produk IKM yang bersertifikasi**	**7,51%**	**7,51%**	**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	-
		Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	**2,3%**	**2,3%**				
		Persentase perwilayahan industri yang terbentuk	**35%**	**35%**				
		Persentase produk IKM yang layak difasilitasi sertifikasi	**100%**	**100%**				
		Persentase IKM yang memiliki sarana prasarana produksi dalam kondisi baik	**60%**	**60%**				
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota	**Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri**			**416.184.000**	**618.284.000**	**202.100.000**	
	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2 Dokumen	3 dokumen	51.000.000	101.000.000	50.000.000	Pelatihan untuk sentra IKM Tahu Desa Sekarputih Kec Bagor
	Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	30.235.000	30.235.000	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1 Dokumen	2 Dokumen	204.609.000	356.709.000	152.100.000	Pelatihan Batik Lanjutan bagi IKM Batik
	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000	121.000.000	-	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	2 Dokumen	9.340.000	9.340.000	-	
							-	
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait**	80%	80%	5.925.000	5.925.000	-	
	Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8 Dokumen	8 Dokumen	5.925.000	5.925.000		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	**Persentase usaha industri yang patuh melaporkan dalam SIINAS**	**25%**	**25%**	**17.985.000**	**17.985.000**	**0**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	2 dokumen	1 dokumen	7.295.000	7.295.000	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)						
	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	4 Dokumen	2 Dokumen	10.690.000	10.690.000	0	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	91%		**101.965.350**	**180.965.350**	**79.000.000**	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	101.965.350	180.965.350	79.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	8950	8950	24.540.500	103.540.500	79.000.000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi yang dibina	770 Orang		77.424.850	77.424.850		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				**743.148.000**	**978.148.000**	**235.000.000**	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	**jumlah sarana distribusi perdagangan**			615.160.000	850.160.000		
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah sarana distribusi perdagangan	2 unit	3 unit	615.160.000	850.160.000	235.000.000	DED Pasar Tawang
							0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				127.988.000	127.988.000	0	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	127.988.000	127.988.000	0	
	PERDAGANGAN				**244.004.500**	**525.863.500**	**281.859.000**	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang taat perizinan**	**21,33%**	**21,33%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
		Persentase pelaku usaha yang memperolehizin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	**26,86%**	**26,86%**	**13.765.000**	**30.945.000**	**17.180.000**	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	**25 Dokumen**	**10 Dokumen**	**3.450.000**	**3.450.000**	-	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	25 Dokumen	10 Dokumen	3.450.000	3.450.000	-	
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	**10.315.000**	**27.495.000**	**17.180.000**	
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	2 Dokumen	2 Dokumen	10.315.000	27.495.000	17.180.000	Pembahasan Perbup Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		ANGGARAN			KETERANGAN
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	**Koefisien laju harga bapokting**	**11,95**	**11,95**	**37.788.500**	**79.823.500**	**42.035.000**	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	**90%**	**90%**				
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**16.988.500**	**59.023.500**	**42.035.000**	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	2.175.000	13.410.000	11.235.000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	14.813.500	45.613.500	30.800.000	- Pasar Murah Menjelang Natal dan Tahun Baru - Sidak Operasi Pasar
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	**20.800.000**	**20.800.000**	-	
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	20.800.000	20.800.000	-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	**Persentase pelaku usaha perdagangan yang terakses pasar**	**13,61%**	**13,61%**	**192.451.000**	**415.095.000**	**222.644.000**	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperolehfasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	75	90	192.451.000	415.095.000	222.644.000	- Batik Fashion - Pameran Dekranasda
		TOTAL			**15.743.306.413**	**16.631.320.323**	**888.013.910**	

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	N I H I L					

BAB V

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 diharapkan memperhatikan keselarasan dan konsistensi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 beserta perubahannya, sehingga target kinerja tahun 2026 dapat dicapai dengan optimal.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Renja Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.